

SKRIPSI

**PERAN MITRA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDEWASAAN
USIA PERKAWINAN DI KABUPATEN BANYUWANGI**



Oleh:
FARAH FAULIN NUR

**PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
SEKOLAH ILMU KESEHATAN DAN ILMU ALAM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
BANYUWANGI
2022**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

**PERAN MITRA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDEWASAAN
USIA PERKAWINAN DI KABUPATEN BANYUWANGI**



Oleh:
FARAH FAULIN NUR

**PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
SEKOLAH ILMU KESEHATAN DAN ILMU ALAM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
BANYUWANGI
2022**

PENGESAHAN

**Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga
dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM.)
pada tanggal 25 Oktober 2022**

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Dr. M. Atoillah Isfandiari, dr., M.Kes.
Anggota : 1. Fonny Indri Hartanti, S.Psi., M.Psi.
2. Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si.**

Mengesahkan

**Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam
Universitas Airlangga**

Direktur,



**Prof. Dr. Soetomo, dr., Sp.U. (K)
NIP 195606081986121001**

PERSETUJUAN

**PERAN MITRA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI KABUPATEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM.)
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu
Alam Universitas Airlangga**

Oleh:

**FARAH FAULIN NUR
101811535012**

Banyuwangi, 26 September 2022

Menyetujui

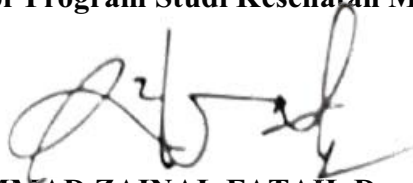
Pembimbing



**Dr. LUTFI AGUS SALIM S.KM., M.Si
NIP 197008201997021001**

Mengetahui

Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat,



**Dr. MOHAMMAD ZAINAL FATAH, Drs., M.S., M.Kes
NIP 196004161994031002**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Farah Faulin Nur
NIM : 101811535012
Program Studi : Kesehatan Masyarakat Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam
Universitas Airlangga
Angkatan : 2018
Jenjang : Sarjana

menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul:

PERAN MITRA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

tidak dilakukan tindak plagiasi atau sejenisnya atas karya ilmiah orang lain. Apabilasuatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat dalam penulisan skripsi ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Universitas Airlangga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banyuwangi, 26 September 2022



Farah Faulin Nur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Skripsi dengan judul "Peran Mitra dalam Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Banyuwangi", sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Dalam skripsi ini dijabarkan tentang evaluasi peran mitra dalam pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Angka pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini masih tinggi. Berbagai macam faktor dapat mendorong terjadinya pernikahan dini bagi remaja yang berusia di bawah 20 tahun. Manifestasi dari kejadian pernikahan dini berdampak pada menurunnya kualitas hidup keluarga karena ketidaksiapan pasangan muda untuk memasuki jenjang pernikahan. Pernikahan dini juga berkorelasi dengan peningkatan *total fertility rate* (TFR) di Kabupaten Banyuwangi sehingga menghambat upaya pemerintah dalam menerapkan ketercapaian program Keluarga Berencana di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu permasalahan yang terkait tentang pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah peranan mitra program yang kurang optimal. Melalui penelitian ini, akan digali fakta mengenai hambatan pelaksanaan program oleh mitra, sehingga temuan pada penelitian ini nantinya akan memberikan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan untuk dapat menyelesaikan masalah di tingkat penyelenggaraan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Banyuwangi.

Pada kesempatan ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Lutfi Agus Salim SKM, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, koreksi serta saran hingga terwujudnya skripsi ini.

Terimakasih dan penghargaan juga disampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Moh. Nasih., MT., A.K., CMA selaku Rektor Universitas Airlangga
2. Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U. (K) selaku Direktur Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga
3. Ibu Dr. Fariani Syahrul, S.KM., M.Kes selaku Ketua Departemen Epidemiologi, Biostatistika Kependudukan, dan Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
4. Dr. Mohammad Zainal Fatah, Drs., M.S., M.Kes selaku Koordinator Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat Sekolah Ilmu Alam dan Ilmu Kesehatan Universitas Airlangga Banyuwangi
5. Ibu Desak Made Sintha Kurnia Dewi, S.KM., M.Kes selaku dosen wali
6. Seluruh dosen pengajar Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga serta dosen peminatan Kesehatan Reproduksi yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya selama masa perkuliahan.
7. Seluruh institusi yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, serta Kantor Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Banyuwangi.
8. Ayah, ibu, serta kakak saya Diya Khoirun Nisa yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi
9. Sahabat saya Ridho Nugroho, Vidia Nuria Rahman, Reza Nabilla Aulyana, serta Ullya Nur Imama yang berperan penting dalam memberikan dukungan, semangat, serta motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
10. Seluruh rekan program studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam angkatan 2018 yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti yang terlibat dan membantu dalam proses penelitian.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga skripsi ini berguna baik bagi diri kami sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkan.

Banyuwangi, 26 September 2022

RINGKASAN

Peran Mitra dalam Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Banyuwangi

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang masih belum dikatakan ideal untuk menikah. Terdapat beberapa definisi mengenai usia minimal menikah, berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan minimal bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan 21 tahun. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu wilayah yang memiliki kasus pernikahan dini yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur. Maraknya kejadian pernikahan dini secara tidak langsung dapat menjadi permasalahan kependudukan karena kejadian pernikahan dini berkorelasi dengan peningkatan *Total Fertility Rate* (TFR), sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyuwangi. Fenomena maraknya pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini, status ekonomi keluarga, serta budaya serta adat istiadat dalam masyarakat.

Atas dasar keseriusan dampak yang ditimbulkan dari maraknya kasus pernikahan dini maka, dibuatlah suatu upaya untuk menekan kasus pernikahan dini melalui pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selaku perwakilan BKKBN atau juga disebut sebagai OPD-KB di Kabupaten Banyuwangi. Dalam penyelenggaraan program PUP, terdapat target yang harus dicapai oleh pelaksana program yaitu prosentase PUS yang istrinya <20 tahun dapat berada di bawah 3,5%. Strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian program salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan sejumlah institusi pemerintah, organisasi profesi, serta dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan untuk menjalankan kemitraan program PUP. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, masih terdapat ketidaksepahaman antara pelaksana dengan mitra program. Diketahui bahwa pada tahun 2021 saja jumlah pernikahan di bawah 20 tahun di Kabupaten Banyuwangi sebesar 1.172 kasus atau sebesar 10,32% dari total pernikahan pertama yang ada di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 adalah masyarakat yang memiliki usia kawin pertama di bawah 20 tahun. Hal ini menandakan bahwa, meskipun telah dilakukan kemitraan dengan sejumlah institusi namun, upaya ini belum dapat mencapai target program PUP yang telah ditetapkan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi peran mitra program dalam penyelenggaraan program PUP di Kabupaten Banyuwangi melalui pendekatan evaluasi *context, input, process*, serta *product* (CIPP). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, jalinan kemitraan PUP di Kabupaten Banyuwangi belum berjalan dengan optimal karena terdapat hambatan pada unsur CIPP di dalam kemitraan. Unsur *context* yang menjadi masalah pada kemitraan PUP antara lain belum adanya kontrak perjanjian kerja sama yang mendukung proses kemitraan, sehingga kemitraan yang dijalankan hanya sebatas kolaborasi pelaksanaan program bersama. Selanjutnya, unsur *input* yang meliputi sumber daya pelaksanaan program saat ini masih terbatas sehingga pelaksanaan program belum terlaksana dengan optimal. Komunikasi serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang menjadi unsur *process* kemitraan PUP juga dinilai kurang efektif hingga mengakibatkan kesalahan persepsi terkait pelaksanaan kemitraan oleh beberapa institusi mitra. Hambatan unsur *product* berupa tidak tercapainya target program PUP pada tahun 2021 disebabkan karena rendahnya pemahaman mitra program terkait target pelaksanaan PUP yang harus dicapai.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan kemitraan program PUP yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi adalah dengan meningkatkan komitmen penyelenggara kemitraan program mengenai mekanisme pelaksanaan program PUP yang tengah dijalankan. Penyediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan program juga harus ditingkatkan oleh masing-masing penyelenggara. Kualitas serta intensitas komunikasi antara pelaksana dengan mitra program perlu ditingkatkan melalui forum komunikasi rutin maupun pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Beberapa upaya ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penyelenggara program dalam mengevaluasi kebijakan kemitraan PUP, sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan serta dapat merealisasikan tujuan program PUP sebagaimana mestinya.

SUMMARY

The Roles of Partners in Implementing the Marriage Age Maturity Program in Banyuwangi District

Early marriage is a marriage that is carried out at an age that is still not ideal for marriage. There are several definitions regarding to the minimum age for marriage, based on the provisions in the Marriage Law Number 16 of 2019, the minimum marriage age limit for both men and women is 19 years. Meanwhile, according to the BKKBN, the ideal age for marriage for men is 25 years and for women 21 years. Banyuwangi District is one of the areas that has a fairly high number of cases of early marriage in East Java Province. The rise of the incidence of early marriage can indirectly be a population problem because the incidence of early marriage is correlated with an increase in the Total Fertility Rate (TFR), thus affecting the rate of population growth in Banyuwangi Regency. The phenomenon of the rise of early marriage is caused by several factors such as low knowledge about the impact of early marriage, family economic status, also culture and customs in society.

The seriousness of the impact caused by the rise of cases of early marriage, an effort was made to suppress cases of early marriage through the implementation of the Marriage Age Maturity Program organized by the Department of Social, Women Empowerment and Family Planning as representatives of the BKKBN or also referred to as officer to Family Planning in Banyuwangi District. In the implementation of the program, there is a target that must be achieved by program implementers, namely the percentage of fertile age couple whose wives are <20 years old can be below 3.5%. One of the strategies implemented to improve program achievements is by collaborating with a number of government institutions, professional organizations, as well as with a number of community organizations to carry out program partnerships. Based on the preliminary studies that have been carried out, there are still disagreements between the implementers and program partners. It is known that in 2021 alone the number of marriages under 20 years old in Banyuwangi District is 1,172 cases or 10.32% of the total first marriages in Banyuwangi District in 2021 are people who have their first marriage age under 20 years. This indicates that, although partnerships have been made with a number of institutions, these efforts have not yet been able to achieve the program targets that have been set.

This research is an exploratory descriptive study using a qualitative approach. The purpose of this study is to identify the role of program partners in implementing the program in Banyuwangi District through a context, input, process, and product (CIPP) evaluation approach. From the results of the study it was found that the partnership in Banyuwangi District has not run optimally because there are obstacles to the CIPP element in the partnership. The context element that becomes a problem in the partnership includes the absence of a cooperation agreement that supports the partnership process, so that the partnership that is carried out is only limited to collaborative program implementation. Furthermore, input elements which include program implementation resources are currently still limited so that program implementation has not been carried out optimally. Communication as well as monitoring and evaluation activities that are elements of the partnership process are also considered less effective, resulting in misperceptions related to the implementation of partnerships by several partner institutions. Barriers to product elements in the form of not achieving program targets in 2021 due to the low understanding of program partners regarding implementation targets that must be achieved.

Recommendations that can be given to optimize the program partnership organized by the Department of Social, Women Empowerment and Family Planning in Banyuwangi District are to increase the commitment of the program partnership organizers regarding the mechanism for implementing the program that is currently being implemented. The provision of infrastructure supporting the implementation of the program must also be improved by each organizer. The quality and intensity of communication between program implementers and partners need to be improved through routine communication forums as well as during program implementation monitoring and evaluation activities. Some of these efforts are expected to be a consideration for program organizers in evaluating partnership policies, so that they can achieve the targets set and can realize the objectives of the program as they should be.

ABSTRAK

Peran Mitra dalam Pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kabupaten Banyuwangi

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat yang pada akhirnya menjadi salah satu permasalahan kependudukan. Pada tahun 2021, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu wilayah yang memiliki kasus pernikahan dini yang tinggi di Provinsi Jawa Timur dengan total kasus pernikahan dini sebesar 1.172 kasus. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang merupakan OPD-KB di Kabupaten Banyuwangi memiliki peran dalam menurunkan prosentase pernikahan dini sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banyuwangi. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah suatu langkah yang diselenggarakan untuk menurunkan kasus pernikahan dini dengan cara mendewasakan usia kawin pertama. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan program ini oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi adalah dengan menjalin kemitraan kepada sejumlah institusi pemerintahan, organisasi profesi, serta beberapa organisasi kemasyarakatan. Namun, jalinan kemitraan program PUP dinilai belum dapat mencapai tujuan dasar program. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran mitra dalam jalinan program PUP berdasarkan analisis *Context, Input, Process, dan Product* (CIPP). Penelitian dilakukan melalui wawancara serta studi dokumentasi kepada sejumlah institusi mitra PUP. Hasil penelitian didapatkan bahwa, jalinan kemitraan PUP di Kabupaten Banyuwangi belum berjalan dengan optimal karena terdapat hambatan pada unsur CIPP di dalam kemitraan. Unsur *context* yang menjadi masalah pada kemitraan PUP antara lain rendahnya komitmen kemitraan karena belum adanya kontrak perjanjian kerja Selanjutnya, unsur *input* yang meliputi sumber daya pelaksanaan program saat ini masih terbatas sehingga pelaksanaan program belum terlaksana dengan optimal. Komunikasi serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang menjadi unsur *process* kemitraan PUP juga dinilai kurang efektif hingga mengakibatkan kesalahan persepsi terkait pelaksanaan kemitraan oleh beberapa institusi mitra. Hambatan unsur *product* berupa tidak tercapainya target program PUP pada tahun 2021 disebabkan karena rendahnya komitmen masyarakat dalam menerapkan upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja.

Kata Kunci : Evaluasi, Mitra, Kolaborasi, Koordinasi, Program Pendewasaan Usia Perkawinan

ABSTRACT

The Roles of Partners in Implementing the Marriage Age Maturity Program in Banyuwangi District

Early marriage is a phenomenon that often occurs in society which in turn becomes one of the population problems. In 2021, Banyuwangi District is one of the areas that has a high case of early marriage in East Java Province with a total of 1.172 cases of early marriage. The Department of Social, Women Empowerment and Family Planning which is the OPD-KB in Banyuwangi District has a role in reducing the percentage of early marriage as an effort to control the rate of population growth in Banyuwangi District. The Marriage Age Maturity Program) is a step implemented to reduce cases of early marriage by maturing the age of first marriage. One of the efforts made to increase the success of this program by the Department of Social, Women Empowerment and Family Planning in Banyuwangi District is to establish partnerships with a number of government institutions, professional organizations, and several community organizations. However, the program partnership has not been able to achieve the basic objectives of the program. This research is an exploratory descriptive study using a qualitative approach. The purpose of this study was to identify the role of partners in the program based on Context, Input, Process, and Product (CIPP) analysis. The research was conducted through interviews and documentation studies to a number of partner institutions. The results showed that the partnership in Banyuwangi District has not run optimally because there are obstacles to the CIPP element in the partnership. The context element that becomes a problem in partnerships is the low commitment of the partnership due to the absence of a work agreement. Furthermore, the input element which includes the current program implementation resources is still limited so that the program implementation has not been carried out optimally. Communication as well as monitoring and evaluation activities that are elements of the partnership process are also considered less effective, resulting in misperceptions related to the implementation of partnerships by several partner institutions. Barriers to product elements in the form of not achieving the program targets in 2021 are due to the low commitment of the community in implementing to prevent early marriage in adolescents.

Keywords : Evaluation, Partners, Collaboration, Coordination, Marriage Age Maturity Program

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN.....	viii
<i>SUMMARY</i>	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Penelitian	10
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Pernikahan Dini.....	12
2.2 Konsep Program Pendewasaan Usia Perkawinan.....	17
2.3 Kemitraan Program Kesehatan	19
2.4 Model Evaluasi Program	26
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	29
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	29
3.2 Penjelasan Kerangka konseptual Penelitian	29
BAB IV METODE PENELITIAN	32
4.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian	32
4.2 Subyek Penelitian.....	32
4.3 Penentuan Subyek Penelitian.....	32
4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
4.5 Definisi Operasional.....	35
4.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	37
4.7 Kerangka Operasional.....	38
4.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
4.9 Uji Keabsahan Data	40
BAB V HASIL PENELITIAN	45
5.1 Karakteristik informan penelitian	45
5.2 Komponen Context dalam Pelaksanaan Kemitraan Program PUP di Kabupaten Banyuwangi.....	46
5.3 Komponen Input dalam Pelaksanaan Kemitraan Program PUP	

di Kabupaten Banyuwangi.....	57
5.4 Komponen Process dalam Pelaksanaan Kemitraan Program PUP di Kabupaten Banyuwangi.....	68
5.5 Komponen Product dalam Pelaksanaan Kemitraan Program PUP di Kabupaten Banyuwangi.....	75
BAB VI PEMBAHASAN	79
6.1 Komponen Context dalam Pelaksanaan Kemitraan Program PUP di Kabupaten Banyuwangi	79
6.2 Komponen Input dalam Pelaksanaan Kemitraan Program PUP di Kabupaten Banyuwangi.....	90
6.3 Komponen Process dalam Pelaksanaan Kemitraan Program PUP di Kabupaten Banyuwangi.....	99
6.4 Komponen Product dalam Pelaksanaan Kemitraan Program PUP di Kabupaten Banyuwangi.....	107
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	109
7.1 Kesimpulan	109
7.2 Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	122

DAFTAR GRAFIK

Nomor	Judul Grafik	Halaman
1.1	Jumlah Pernikahan Dini di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 2020	3
1.2	Data Jumlah Permohonan Izin Dispensasi Nikah	4
1.3	Data TFR Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2020	5

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
3.1	Kerangka Konseptual.....	29
4.1	Kerangka Operasional	38

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
4.1	Waktu Penelitian.....	34
4.2	Definisi Operasional.....	35
5.1	Karakteristik Informan Penelitian	45

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.	Surat Izin Penelitian	122
2.	Sertifikat kelaikan etik.....	123
3.	Informed Consent.....	124
4.	Panduan Wawancara dengan Informan Kunci Penelitian	125
5.	Panduan Wawancara dengan Informan Utama Penelitian	128
6.	Panduan Wawancara dengan Informan Tambahan Penelitian	130

DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH

Daftar Arti Lambang

&	= dan
$\geq$	= lebih dari sama dengan
$\leq$	= kurang dari sama dengan
%	= persen
\$	= dollar
/	= per
cd	= candela
IU	= international unit

Daftar Singkatan

r	= correlation coefficient
df	= degree of freedom
SEM	= standard error of the mean
ATP	= adenosine 5'-triphosphate (adenosine triphosphate)
EDT	= ethylenediaminetetraacetate
EEG	= electroencephalogram
log	= logarithm (to base 10)

Daftar Istilah

BIMWIN	= Bimbingan Perkawinan
BKKBN	= Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
BRUS	= Bimbingan Remaja Usia Sekolah
GenRe	= Generasi Berencana
IBI	= Ikatan Bidan Indonesia
KB	= Keluarga Berencana
OPD-KB	= Organisasi Perangkat Daerah Bidang Keluarga Berencana
PIK R/M	= Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
PKB	= Penyuluh Keluarga Berencana
PUP	= Pendewasaan Usia Perkawinan
PUS	= Pasangan Usia Subur
SOP	= Standar Operasional Prosedur
SPM	= Standar Pelayanan Minimal
TP PKK	= Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
TFR.	= <i>Total Fertility Rate</i>
UKP	= Usia Kawin Pertama
UKS	= Usaha Kesehatan Sekolah